

Implementasi Upah dan Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Perkapita di Indonesia

Implementation of Wages and Taxes to Increase Income Percapita in Indonesia

Qarina

UIN Alauddin Makassar

Email: qarina.hairuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study aims to analyze how wages and taxes can increase per capita income in Indonesia. By using path analysis techniques (path analysis), empirically this study found the result that wages have a positive and significant effect on GDP per capita both directly and indirectly through taxes.

Keywords: *wages, taxes, income percapita*

Abstrak

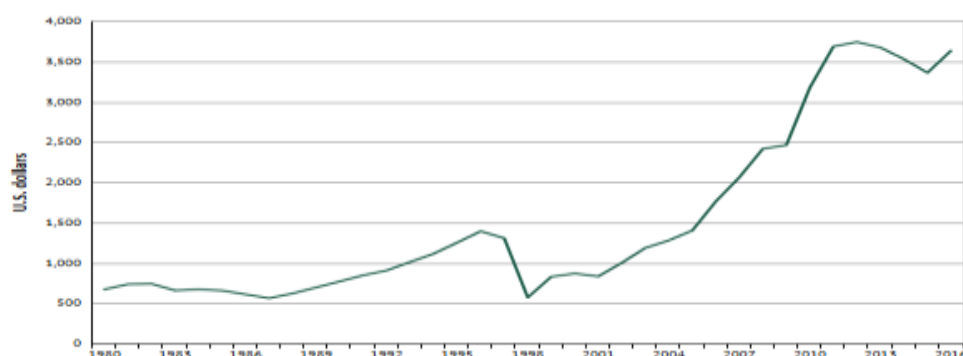
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upah dan pajak mampu meningkatkan pendapatan perkapita di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) maka secara empiris penelitian ini menemukan hasil bahwa Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak.

Kata kunci: *upah, pajak, pendapatan perkapita.*

PENDAHULUAN

Pada umumnya perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya sebagai gambaran. Dalam menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau berkembang, *World Bank* melakukan melalui pengelompokan besarnya PDB, dan PDB suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Todaro & Smith, 2008).

Grafik 1: PDB Perkapita Indonesia 1980 - 2016



Sumber: World Bank (2022)

Berdasarkan data World Bank 2017, PDB per kapita Indonesia meningkat secara stabil pada tahun 2000-an dan setelahnya. PDB per kapita Indonesia

meningkat tajam selama satu dekade terakhir (meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2011 dan 2015). Proyeksi World Bank bahwa Indonesia akan mencapai batasan 3.000 dollar AS pada tahun 2020 akan tetapi, Indonesia telah mencapai level PDB per kapita sebesar 3.000 dollar AS satu dekade lebih awal. Hal ini dianggap sebagai langkah yang penting sebab hal ini seharusnya menyebabkan percepatan pengembangan di sejumlah sektor (seperti retail, otomotif, properti) karena permintaan konsumen yang meningkat, dan karenanya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat kesenjangan antara statistik dan kenyataan karena kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia (yang mewakili hanya 0,02% dari total penduduk Indonesia) setara dengan 25% PDB Indonesia. Kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3% PDB (yang merupakan jumlah yang sama dengan kombinasi harta milik 60 juta orang termiskin di Indonesia). Angka-angka ini mengindikasikan konsentrasi kekayaan yang besar untuk kelompok elit yang kecil. Terlebih lagi, kesenjangan distribusi pendapatan diperkirakan akan meningkat di masa mendatang sehingga kesejahteraan masyarakat masih mengalami ketidakpastian.

Redistribusi pendapatan merupakan langkah kebijakan publik untuk mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan. Salah bentuk kebijakan publik untuk mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan adalah sistem pengenaan pajak. Pajak dibayarkan ke pihak yang berwenang guna membiayai kebutuhan bersama seluruh anggota kelompok masyarakat. (Rys, 2010) Negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan dengan menerapkan *welfare state* (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Ketidaksempurnaan mekanisme pasar mengakibatkan peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai *agent of economic and social development*, artinya pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian *public expenditure* dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Menurut Keynes solusi bagi negara dengan kondisi ekonomi yang buruk yang ditandai dengan masalah kemiskinan atau tingkat kesejahteraan yaitu *prime the pump - using: government spending as stimulus will be amplified via a multiplier*. Keynes mendukung intervensi pemerintah selama perekonomian mengalami ketidakstabilan. Sementara itu, Stiglitz (1999) mendefinisikan pajak sebagai transfer uang dari satu individu kepada individu lain melalui pemerintah untuk mendukung penyediaan pelayanan umum yang dilakukan secara dipaksakan dengan menggunakan payung hukum dan kewenangan yang didapat dari proses politik. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan jasa dasar bagi masyarakat miskin. Sehingga, dengan adanya pajak Pemerintah membuat program

pengentasan kemiskinan yang bisa menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara sekaligus mewujudkan kehidupan bangsa yang berbasis gotong royong.

TINJAUAN PUSTAKA

Ricardo (1998) dalam teori upah wajar (alami) menerangkan bahwa upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya, dan upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Bila menurut upah pasar lebih tinggi dari upah kodrat maka kemakmuran akan meningkat. Mill (2000) dalam *Wage Fund Theory*, menerangkan bahwa tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan tabungan akan meningkatkan nilai investasi pada sektor-sektor ekonomi sehingga sektor-sektor ekonomi tersebut berupaya meningkatkan kapasitas produksinya, yaitu dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Peningkatan modal (*capital*) ini berakibat meningkatnya upah pekerja karena permintaan tenaga kerja semakin meningkat. Teori ini juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Sehingga menurut teori ini tingkat upah dapat ditingkatkan hanya dengan mengurangi penawaran tenaga kerja dan dengan meningkatkan tabungan. Adapun, Mankiw *et al* (2006) berpendapat teori standar dari pajak optimum adalah sistem perpajakan harus dipilih untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial terhadap seperangkat keterbatasan yang ada. Literatur pajak optimal secara khusus memperlakukan perencanaan sosial sebagai utilitarian: dimana fungsi kesejahteraan sosial didasarkan pada utilitas individu dalam masyarakat. Dalam analisis yang paling umum, literatur ini menggunakan fungsi kesejahteraan sosial yang merupakan fungsi nonlinear dari utilitas individual. Non linear mengizinkan perencanaan sosial utilitas yang terdistribusi merata. Masalah utama dalam pajak optimum adalah *trade-off* antara efisiensi dan keadilan (*equity*). *Trade-off* antara efisiensi dan keadilan adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Multiplier Tax Theory oleh Mankiw (2006) mengemukakan perubahan pajak dapat mempengaruhi pendapatan ekuilibrium. Penurunan pajak secara langsung akan menaikkan *disposable income* dan dengan demikian menaikkan konsumsi. Keynes dalam Jhingan (1996) menekankan pentingnya permintaan agregat atau permintaan efektif sebagai faktor utama penggerak perekonomian, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Keynes menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengeluaran karena memandang pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan “permintaan

efektif” jika sumber daya dipakai tanpa merugikan konsumsi atau investasi. Pada masa resesi, kenaikan pada pengeluaran Pemerintah (G) akan mendorong kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I), dan karenanya dapat menaikkan GDP (Y).

Mankiw (2006) menjeaskan dalam model Solow bahwa modal mengalami *diminishing returns*. Jika persediaan tenaga kerja dianggap tetap, dampak akumulasi modal terhadap penambahan output akan selalu lebih sedikit dari penambahan sebelumnya, mencerminkan produk marjinal modal (*marginal product of capital*) yang kian menurun. Jika diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, maka *diminishing return* pada modal mengindikasikan bahwa pada satu titik, penambahan jumlah modal (melalui tabungan dan investasi) hanya cukup untuk menutupi jumlah modal yang susut karena depresiasi. Pada titik ini perekonomian akan berhenti tumbuh, karena diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja. Mankiw dalam Oktavia (2005) menyebutkan bahwa jika diasumsikan terjadi pertumbuhan tenaga kerja (akibat pertumbuhan penduduk), pada jangka pendek, pertumbuhan output akan melambat karena adanya *diminishing return* dan perekonomian akan mengalami konvergensi ke arah tingkat pertumbuhan *steady-state* yang konstan (yaitu tidak ada pertumbuhan ekonomi per kapita). Jadi, model Solow memprediksi bahwa pertumbuhan penduduk akan memengaruhi *standard of living* suatu negara yang dicerminkan dalam PDB per kapita. Madsen (2006) mengungkapkan PDB per kapita merupakan saham anggota individu dari populasi terhadap PDB tahunan. Secara matematis dihitung dengan membagi PDB riil atau nominal dengan jumlah penduduk pertahun. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Peningkatan pendapatan perkapita menandakan pertumbuhan ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni kegiatan penelitian dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data-data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang meliputi data time series. Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia dengan mengambil data di Badan Pusat Statistik Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Upah, Pajak dan PDB Perkapita yang bersifat time series dalam bentuk tahunan dari tahun 2000-2015.

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel perantara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDB Perkapita, variabel independen dalam

penelitian ini adalah jaminan sosial, upah minimum, dan investasi variabel perantara yaitu Pajak dimana metode analysis yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, maka model yang digunakan adalah model analisis jalur (*path analysis*) melalui bantuan program komputer Amos. Model ini dikembangkan dengan model Fungsi Produksi Cobb-Douglas. Adapun bentuk fungsi sebagai berikut:

$$Y_1 = f(X_1,)$$

$$Y_1 = \alpha_0 X_1^{\alpha_1} e^{\mu_1}$$

$$\ln Y_1 = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \mu_1 \dots\dots\dots (1)$$

Pengaruh langsung upah minimum, dan Pajak terhadap PDB Perkapita dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_2 = f(Y_1, X_1,)$$

$$Y_2 = \beta_0 Y_1^{\beta_1} X_1^{\beta_2} e^{\mu_2}$$

$$\ln Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln Y_1 + \beta_2 \ln X_1 + \mu_2 \dots\dots\dots (2)$$

Pengaruh upah minimum, terhadap PDB Perkapita melalui pajak melalui substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \mu_1$$

$$\ln Y_2 = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_1 + \beta_2 \ln X_1 + \mu_2$$

$$\ln Y_2 = \beta_0 + \beta_1 (\alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \mu_1) + \beta_2 \ln X_1 + \mu_2$$

Dimana:

X_1 : Upah Minimum (Rupiah)

Y_1 : Pajak (Rupiah)

Y_2 : PDB Perkapita (Rupiah)

α_0, β_0 , = Masing-masing sebagai Intersep dalam tiap model yang digunakan.

μ_0, μ_1, μ_2 , = Masing-masing sebagai error term dalam model yang digunakan.

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka didapat model untuk hubungan pengaruh langsung masing-masing variabel sebagai berikut:

α_1 = Koefisien regresi upah (X_1) terhadap Pajak (Y_1)

β_1 = Koefisien regresi penerimaan pajak (Y_1) terhadap PDB Perkapita (Y_2)

β_2 = Koefisien regresi upah minimum (X_1) terhadap PDB Perkapita (Y_2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah *path analysis* dengan menggunakan data *time series* dan menggunakan program Amos 20. Hasil estimasi pengaruh upah, terhadap PDB Perkapita melalui pajak, berdasarkan data yang diolah pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil analisis hubungan secara langsung upah, terhadap Pajak dan PDB perkapita.

Variabel	Estimate	S.E.	C.R.	P	Keterangan
X1 ---> Y1	.509	.030	16.765	***	$\alpha=5\%$
Y1 ---> Y2	.726	.154	4.729	***	$\alpha=5\%$
X1 ---> Y2	.241	.080	3.003	.003***	$\alpha=5\%$

Sumber: Pengujian Model Amos 20.

Keterangan: ***: $\alpha=5\%$

Tabel 2. Hasil analisis hubungan secara tidak langsung upah, terhadap PDB perkapita melalui pajak.

Variabel	Estimate	P	Keterangan
X1 ke Y2 melalui Y1	0.369	***	$\alpha=5\%$

Sumber: Pengujian Model Amos 20. (Lampiran *indirect effects*)

Keterangan: ***: $\alpha=5\%$

Secara langsung, variabel upah (X_2), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita (Y_2), Sementara itu, secara tidak langsung melalui variabel pajak (Y_1), variabel upah (X_2), berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita (Y_2).

Berdasarkan Tabel 1, hasil penelitian menunjukkan secara statistik nilai estimasi koefisien upah terhadap PDB Perkapita sebesar 0.241 yang dapat diartikan bahwa pengaruh langsung upah terhadap PDB Perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan pada $\alpha=5\%$ dengan nilai probabilitas 0.003. Interpretasinya menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan upah sebesar satu persen akan meningkatkan PDB Perkapita sebesar 0.241 persen. Sebaliknya, satu persen penurunan upah akan menurunkan PDB Perkapita sebesar 0.241 persen.

Pengaruh antara variabel upah minimum terhadap PDB Perkapita memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan, berarti meningkatnya upah dalam bentuk upah minimum akan meningkatkan PDB Perkapita di Indonesia. Kenaikan upah akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional karena upah akan meningkatkan tingkat konsumsi, selain itu, masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya menjadi lebih layak dan meningkatkan daya beli bahkan menabung untuk hari yang akan datang. Upah yang meningkat juga akan memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya. Meningkatnya upah minimum akan meningkatkan produktivitas masyarakat, daya beli

masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi *basic need*, sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat ketika terjadi kenaikan upah.

Hasil ini sesuai dengan teori Parkin (2012) yang menyatakan bahwa untuk menghitung GDP melalui metode pendapatan diukur menggunakan indikator *rent*, yaitu pendapatan dari penyewaan tempat, tanah, ataupun pembelian bahan baku dan sumber daya alam. *Wage*, yaitu upah bagi karyawan dan tenaga kerja, *interest* yaitu bunga bagi investasi dari para pemilik modal dan profit yaitu pendapatan perusahaan yang dikurangi oleh beban-beban.

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan secara statistik nilai estimasi koefisien upah terhadap penerimaan pajak sebesar 0.509 yang dapat diartikan bahwa pengaruh langsung upah terhadap penerimaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada α 5% dengan nilai probabilitas 0.000. Interpretasinya menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan upah sebesar satu persen akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0.509 persen. Sebaliknya, satu persen penurunan upah akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 0.509 persen.

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan secara statistik nilai estimasi koefisien upah terhadap PDB Perkapita melalui penerimaan pajak sebesar 0.369 yang dapat diartikan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita melalui penerimaan pajak dengan α 5% dengan nilai probabilitas 0.000. Interpretasinya menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan upah sebesar satu persen maka akan meningkatkan PDB Perkapita sebesar 0.369 persen melalui penerimaan pajak. Sebaliknya, satu persen penurunan upah akan menurunkan PDB Perkapita sebesar 0.369 persen melalui penerimaan pajak.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak. Hasil ini sesuai dengan konsep welfare state oleh Barr (1998; dalam Simarmata, 2008) yang mengidentifikasi peran negara kesejahteraan. Sumber kesejahteraan masyarakat berasal dari: (1) Kesejahteraan masyarakat dapat mengalir lewat gaji atau pemasukan (*income*) dari tempat di mana ia bekerja. Gaji yang layak dan aturan pekerjaan yang manusiawi dapat membawa warga pada kehidupan yang sejahtera. Menurut penulis pendapatan masyarakat meningkat maka kemampuan untuk membayar pajakpun semakin besar. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Sehingga, peningkatan penerimaan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Peningkatan penerimaan pajak oleh wajib pajak yang patuh akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak yang patuh. Wajib pajak adalah seseorang atau suatu badan yang telah memperoleh penghasilan dan terdaftar mempunyai kewajiban untuk melaporkan penerimaannya kepada negara. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pajak memiliki dampak dua arah pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sisi lain penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi oleh Pemerintah akan berdampak langsung pada menurunnya konsumsi masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposibel masyarakat. Pendapatan disposibel merupakan sejumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi masyarakat. Ketika tarif pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel akan menjadi turun, sebab masyarakat perlu membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan menurunnya pendapatan disposibel ini, otomatis konsumsi masyarakat pun akan menjadi turun pula. Turunnya konsumsi agregat masyarakat akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional ekuilibrium. Demikian pula, jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Kenaikan komponen ini akan dapat menaikkan Pendapatan Domestik Bruto yang tentu saja dengan asumsi *ceteris paribus*.

Peningkatan pungutan pajak akan menurunkan nilai konsumsi dan karena konsumsi berkorelasi positif dengan Y atau GDP, maka setiap peningkatan pajak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (asumsi *ceteris paribus*). Di sisi lain, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, ini mengindikasikan bahwa negara masih dan akan sangat bergantung pada penerimaan perpajakan dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin melalui pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto, pemerintah perlu melakukan belanja-belanja yang memiliki multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Belanja yang dimaksud adalah belanja modal (infrastruktur). Penerimaan Negara memiliki arti penting dalam menciptakan perluasan kapasitas fiskal pemerintah yang pada akhirnya dapat memperluas pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penerimaan negara termasuk di antaranya penerimaan perpajakan, penting untuk dijaga agar secara konsisten menunjukkan prospek yang positif setiap tahunnya demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pentingnya peran penerimaan pajak bagi pemerintah untuk menciptakan kapasitas fiskal nasional tersebut di atas, penerimaan pajak yang tinggi akan berdampak positif pada terciptanya perluasan kapasitas fiskal nasional yang berujung pada peningkatan belanja-belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini juga berbanding lurus dengan Pendapatan Domestik Bruto yang artinya kenaikan belanja pemerintah sebesar X akan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar X. Sehingga, pajak

mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional saat ini.

KESIMPULAN

Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak. Dimana setiap terjadi peningkatan upah minimum akan meningkatkan penerimaan pajak yang akhirnya meningkatkan PDB Perkapita di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Cathie, Madsen. 2006. *Pentingnya PDB Perkapita*. www.Nationmaster.com
- Halomoan, K. ., & Herning Sitabuana, T. . (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), 1243-1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Haninun, H., & Lourent, A. . (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 1(3), 645-654. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>
- Jhingan, M.L., 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, Gregory, 2006. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- Oktavia, Putu. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perkapita*. Jurnal Ekonomi, <http://www.96147.com/>
- Parkin, Michael. 2012. *Macroeconomics, 10th Edition*. University of Western: Pearson.
- Ricardo, David. 1998. *Organizational Behaviour and Personnel Psychology*. Illinois: Homewood
- Rys, Vladimir. 2010. *Reinventing Social Security Worldwide: Back To Essentials*. University of Bristol: The Policy Press
- Simarmata, Henry T. 2008. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina.
- Stiglitz, Joseph E. 1999. *Economics of the Public Sector*. Third edition. New York: W.W. Norton and Company
- Stuart Mill, John. 2000. *Industrial Organizational Psychology*. New York: Mc Graw Hill. Inc
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2008. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga
- Zakaria, Z., & Zakky Almubaroq, H. . (2022). Project Management in the Development of Air Without Tire (Case Study in Polytechnic Indonesia

National Army). International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL), 1(4), 483-494. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i4.57>